KASUS KORUPSI DI PURWOKERTO

Tersangka Kembalikan Uang Rp 3,5 Miliar

PURWOKERTO (KR) - Tersangka dugaan korupsi senilai Rp 4 miliar, MW (56), Kamis (1/2) mengembalikan uang Rp 3,5 miliar kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto. Uang tersebut diserahkan dalam bentuk pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 oleh kuasa hukum tersangka MW di Kejari Purwokerto.

Kepala Kejari (Kajari) Purwokerto, Imanuel Rudy Pailang mengatakan, pengembalian uang tersebut merupakan kerugian negara pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pemberian fasilitas Kredit proyek di Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Purwokerto oleh CV AM pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Double Track antara stasiun Purwokerto sampai stasiun Kroya wilayah DAOP V Purwokerto Tahun 2016.

"Modusnya tersangka MW ini pada tahun 2016 menghubungi saudara SW yaitu seorang pegawai biasa di Dirjen Perkeretaapian di Balai Semarang, tersangka meminta bantuan untuk meminta sejumlah dokumen dan dokumen lain," kata Rudy.

Tersangka MW yang merupakan Direktur CV AM di Jalan dr Angka Purwokerto. Kemudian dengan bantuan SW membuat Purchasing Order (PO) Nomor 70/PJGCK/ X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, dimana Purchasing Order (PO) Nomor 70/PJGCK/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang tadinya digunakan untuk laporan kepada atasannya tetapi malah di gunakan untuk mengajukan kredit proyek di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto

"Purchasing Order (PO) yang menerangkan tersangka seolah-seolah mendapat orderan batu ballas. Kemudian meminta seolah-olah oknum ini mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pembuatan PO tersebut dan surat-surat lainnya persyaratan dari bank, agar tersangka dapat memuluskan niatnya untuk pencairan kredit," jelasnya.

KR-Driyanto

Uang kembalian dari tersangka MW diserahkan ke Kejari Purwokerto.

Kemudian MW mengajukan Surat Permohonan Kredit Proyek No 056/CV AR/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 kepada Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto dimana kredit yang diajukan tersangka MW adalah berupa kredit proyek. "Pengajuan kredit oleh tersangka kemudian disetujui Bank sebesar Rp 10 Miliar," sambungnya.

Dijelaskan, MW sendiri bukan pihak yang mendapatkan pekerjaan (bukan pemenang proyek), sehingga MW tidak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan dan tidak bisa menyelesaikan kreditnya lalu kreditnya di nyatakan macet.

"Sejak tahun 2016 dan kredit diperpanjang tahun 2017, lalu dinyatakan macet 2018, tersangka cuma mampu memgembalikan Rp 6 miliar dan Rp 4 miliar dikembalikan Jamkrindo, tetapi syarat-syarat yang diajukan juga tidak benar," bebernya

Menurut, Rudy, syarat-syarat yang diajukan harusnya ada kontrak, surat penetapan lelang asli. Tetapi, yang diajukan PO fiktif dan merupakan hasil fotokopi. **(Dri)-f**

KEPALA BAPANAS PASTIKAN

Hingga Ramadan, Stok Pangan Cukup

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, ketersediaan stok pangan untuk Februari 2024 dan menghadapi Ramadan pada Maret 2024 dinilai cukup.

"Insya Allah ketersediaan cukup," ujar Arief saat dihubungi *Antara* di Jakarta, Kamis (1/2).

Arief menyampaikan, Pemerintah terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan pangan nasional dengan berbagai cara, mulai dari percepatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, hingga bantuan pangan beras.

Pemerintah juga akan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terdiri dari 11 komoditas bahan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula, ikan, dan minyak goreng.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga ketersediaan pangan di seluruh Indonesia.

Penugasan dan pengelolaan CPP ini diselenggarakan melalui Bapanas yang dapat ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Arief memastikan, CPP akan terus terjaga meski ancaman cuaca dan El Nino diprediksi masih terus berlanjut hingga Februari. "Harus terus terjaga," ucapnya.

Sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan khususnya beras dan juga inflasi, Pemerintah menggelontorkan Program Bantuan Pangan Beras berupa penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah yakni KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Besaran bantuan sebanyak 10 kg beras/KPM/bulan. Pemberian bantuan ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK. Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan. **(Ant/San)-f**

KUNJUNGI AIR TERJUN TUMPAK SEWU

Wisman Terjebak Banjir Lahar Semeru

LUMAJANG (KR) - Sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) sempat terjebak saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru yang menerjang secara tiba-tiba dari atas air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (31/1).

"Kemarin beberapa turis asing dan wisatawan domestik yang didampingi oleh guide turun ke bawah air terjun Tumpak Sewu saat terjadi banjir lahar yang membawa endapan lumpur," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati saat dikonfirmasi per telepon, di Lumajang, Kamis (1/2).

Saat itu, lanjut Yuli Harismawati, cuaca cukup cerah di objek wisata air terjun Tumpak Sewu, sehingga beberapa wisatawan asing dan domestik bersama guide turun ke dasar air terjun untuk melihat lebih dekat keindahan air terjun. "Beberapa wisatawan itu melihat percikan lumpur yang turun dengan deras dari atas. Semuanya menghindar dan bernaung ke tempat yang aman karena debit air cukup tinggi," tuturnya.

Pihak pemandu wisata akhirnya mengirimkan foto kepada rekannya yang berada di atas dan meminta pertolongan agar segera dievakuasi dari dasar air terjun Tumpak Sewu bersama rombongan wisman dari China yang masuk dari Kabupaten Malang.

"Sebanyak 20 guide mengevakuasi semua wisatawan asing dan domestik yang terjebak di bawah air terjun Tumpak Sewu saat banjir lahar hujan itu surut. Semuanya dalam kondisi selamat," katanya.

Kendati demikian pihak Dinas Pariwisata Lumajang tidak menutup sementara objek wisata air terjun Tumpak Sewu pascakejadian terjebaknya wisatawan asing dan domestik saat banjir lahar, sehingga air terjun yang eksotis tersebut tetap dibuka untuk umum. **(Ant/San)-d**

Bappebti Blokir 1.855 Situs PBK Ilegal

JAKARTA (KR) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.855 situs web ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2023.

Plt Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar. Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhatihati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Kasan di Jakarta, Kamis (1/2).

Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Ia berharap, masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan ke Bappebti melalui saluran media sosial atau datang langsung bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," kata Kasan.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah diblokir Bappebti dapat dinormalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti. Langkah ini sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat. **(Ant/San)-d**

TEMUAN BAWASLU DIY

Kampanye di Pentas Jathilan Tanpa STTP

YOGYA (KR) - Pentas jathilan kerap kali digunakan sebagai metode kampanye oleh peserta pemilu untuk menarik simpati dari masyarakat. Sayangnya kegiatan itu dilakukan tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), yang menjadi salah satu syarat sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu.

"Kami masih sering menemukan kampanye terselubung tanpa STTP dalam masa kampanye terbuka. Seperti yang sempat merebak kegiatan kampanye dalam bentuk jathilan. Itu modus untuk mencari simpati. Ironisnya pihak penyelenggara tidak mengurus izin kampanye, tapi pasang banner dan ada calon legislatif yang dihadirkan di situ. Seperti yang kami temukan di lapangan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Mohammad Najib di Yogyakarta, Kamis (1/2).

Selain beberapa bentuk pelanggaran seperti yang ditemukan di atas, salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemui adalah pembagian doorprize dan tebus murah saat kampanye terbuka. Bawaslu DIY menyarankan diskon atau potongan itu maksimal adalah 50 persen, sesuai arahan dari Ketua Bawaslu RI.

"Memang tidak ada sandaran hukumnya. Tapi diskresi yang disampaikan Ketua Bawaslu RI adalah ya itu wajar kalau maksimal marginnya adalah 50 persen. Apabila di lapangan ditemui tebus murah yang potongan harganya lebih dari 50 persen, Bawaslu DIY menginstruksikan agar hal tersebut tidak dilakukan," tegas Najib.

Ditambahkan, Bawaslu DIY menekankan ke pengawas Pemilu untuk melakukan pencegahan. "Jadi apabila diperingatkan mereka bersedia, tidak melakukan, mengurungkan niatnya (melakukan indikasi pelanggaran) tidak ditindaklanjuti. Kecuali kalau dicegah, tapi tetap jalan terus maka akan dilakukan upaya penindakan," pungkasnya. **(Ria)-d**

Integrasi Holding Ultra Mikro BRI Group Koneksikan Jutaan Masyarakat Akses Layanan Perbankan

Acara diskusi Taman BRI menghadirkan dua pembicara, yakni Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama BRI Sunarso. KR-Istimewa

JAKARTA (KR) – Holding Ultra Mikro (UMi) terbukti mampu memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat mikro dan ultra mikro di Indonesia. Selain itu, kehadiran Holding UMi yang merupakan integrasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah memberikan dampak positif dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi BRI Group.

BRI melalui BRI Research Institute pun menyelenggarakan acara Diskusi Taman pada 12 Januari 2023 dengan mengangkat tema "How Ultra Micro Holding Connects Finance to Millions in Indonesia". Acara diskusi ini menghadirkan dua pembicara, yakni Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama BRI Sunarso. Keduanya membahas bagaimana Holding UMi telah menjadi sumber pertumbuhan baru dan mampu mengintegrasikan jutaan ultra mikro di Indonesia.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa Holding UMi telah menjadi sumber pertumbuhan baru karena BRI memiliki strategi mendorong nasabah untuk naik kelas, memperbesar customer base dan melayani masyarakat dengan biaya se-efesien mungkin. "Kami memiliki journey pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas nasabah UMi, yakni dengan tiga tahapan empower, integrate dan upgrade," ujarnya.

Pertama, empower dilakukan PNM dengan cara memberdayakan usaha kelompok masyarakat prasejahtera agar dapat menjadi wirausaha yang mandiri.

Kemudian kedua, integrate di mana seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani BRI, seperti KUR Mikro dan Pegadaian juga bisa melayani untuk produk gadai. Ketiga, yakni upgrade untuk ultra mikro yang sudah naik kelas ke segmen mikro. Mereka dapat dilayani oleh BRI melalui produk kredit komersial seperti Kupedes.

Senada, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga mengungkapkan bahwa untuk membangkitkan masyarakat UMi masuk ke akses financing dan sustainable perlu tiga aspek pemberdayaan. Pertama, menurunkan operating cost dengan cara membangun jaringan agen. Kedua perluasan penjaminan, ketiga adalah pembinaan. "Ketiganya ini penting supaya masyarakat punya kompetensi berusaha dengan benar, mulai dari bagaimana packaging produk, logistic, dan mengelola keuangannya. Ini jadi road pembinaan Holding UMi. Seperti Account Officer (AO)nya Mekaar dengan ibu-ibu prasejahtera yang dilakukan pembinaan. Jadi tidak hanya diberikan uang atau pinjaman, tapi perlu dibina juga supaya mereka tahu bagaimana cara berusaha dan mengelola cash flow-nya dengan benar," paparnya.

Tiga aspek tersebut harus dilakukan melalui jaringan yang besar. Jaringan ini bukan hanya dari BRI melalui unit desanya, tetapi juga melalui PNM dengan para AO Mekaarnya yang sudah mencapai sekitar 50 ribu dan Pegadaian yang memiliki banyak cabang, serta diperkuat dengan AgenBRILink. "Ekosistem ini kita bangun bersama. Ketiganya masuk dalam konsep Holding Umi," tambahnya.

Diketahui, Holding UMi menargetkan dapat melayani masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan formal (unbankable) hingga 45 juta hingga 2024. Adapun jumlah debitur Holding UMi juga terus meningkat. Per September 2023, jumlah debitur holding ini sudah mencapai 36,6 juta atau tumbuh 22 persen dari posisi September 2021. Artinya BRI, Pegadaian dan PNM masih akan menjaring 8,4 juta debitur ultra mikro baru hingga 2024. Total oustanding kredit holding ultra mikro mencapai Rp 590,7 triliun per akhir September 2023 atau tumbuh 11,6 persen secara tahunan. Angka tersebut nilainya sudah meningkat 27,38 persen apabila dibandingkan dengan periode awal pembentukan holding.

Rinciannya, kontribusi kredit mikro BRI selaku induk holding mencapai Rp479,9 triliun, atau naik 10,9 persen secara tahunan dengan 14,2 juta debitur. Adapun porsi kredit Pegadaian mencapai Rp65,6 triliun, atau meningkat 17,3 persen dengan jumlah peminjam sebanyak 7,4 juta. Pembiayaan PNM mencapai Rp45,3 triliun, atau tumbuh 14,3 persen dengan 15 juta debitur.

Dalam menyalurkan kredit, Holding Ultra Mikro memanfaatkan outlet fisik, channel digital dan AgenBRILink. Per September 2023, Holding UMi sudah memiliki outlet fisik sebanyak 15.300 unit, diantaranya 6.809 outlet BRI, 4.087 unit kantor Pegadaian dan 4.482 kantor PNM. Selain itu, ketiganya juga punya jaringan kantor bersama yang bernama Senyum (Sentra Layanan Ultra Mikro) sebanyak 1.016 unit. Jaringan tersebut didukung oleh tenaga pemasar mikro sebanyak 74.200, terdiri dari 29.900 Mantri BRI, 2.500 penaksir Pegadaian dan 44.800 AO PNM. **(Sal)**

Diskusi Taman BRI dengan mengangkat tema "How Ultra Micro Holding Connects Finance to Millions in Indonesia". KR-Istimewa